

ABSTRACT

The tax enforcement letter issued if the taxpayers do not pay in accordance to the tax regulation. The purpose of this research is to know the influence of tax enforcement letter on income tax and value added tax received at tax office. This research used hypothesis test method. The data in this research are taken from tax service office Pratama Bojonagara Bandung and tax office service Pratama Cibeunying Bandung in the period 2008-2010. The data are analyzed using regression method. The result showed that the tax enforcement letter have no influence on income tax and value added tax received.

Keyword : Enforcement Letter, Income tax, Value Added Tax Received

ABSTRAK

Surat Paksa diterbitkan apabila Wajib Pajak tidak membayar pajak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh Penerbitan Surat Paksa terhadap Penerimaan PPh dan PPN pada Kantor Pelayanan Pajak. Metode penelitian yang digunakan adalah pengujian hipotesis. Penelitian ini dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bojonagara Bandung dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibeunying Bandung periode 2008-2010. Data dianalisis menggunakan metode Regresi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerbitan Surat Paksa tidak mempunyai pengaruh terhadap Penerimaan PPh dan PPN.

Kata Kunci : Surat Paksa, Penerimaan PPh dan PPN.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
<i>ABSTRACT</i>	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR LAMPIRIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	8
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian	8
1.4 Kegunaan Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Dasar Hukum Yang Mengatur Tentang Pajak	10
2.2 Pengertian Umum Pajak	11
2.2.1 Pengertian Pajak	11
2.2.2 Fungsi Pajak	13

2.2.3 Syarat Pemungutan Pajak	13
2.2.4 Sistem Pemungutan Pajak	14
2.2.5 Timbul dan Hapusnya Utang Pajak	15
2.2.6 Hambatan Pemungutan Pajak	16
2.2.7 Hak dan Kewajiban Wajib Pajak	17
2.2.8 Penerimaan Pajak	22
2.3 Pajak Penghasilan (PPh)	23
2.3.1 Subjek Pajak dan Wajib Pajak	27
2.3.1.1 Bukan Subjek Pajak Penghasilan	29
2.3.2 Objek Pajak	30
2.3.2.1 Bukan Objek Pajak	32
2.3.3 Pajak Penghasilan Pasal 21	34
2.3.3.1 Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21	34
2.3.4 Pajak Penghasilan Pasal 22	36
2.3.5 Pajak Penghasilan Pasal 23	36
2.3.6 Pajak Penghasilan Pasal 24	36
2.3.7 Pajak Penghasilan Pasal 25	37
2.4 Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	37
2.4.1 Objek Pajak Pertambahan Nilai	38
2.4.2 Pajak Penjualan atas baran Mewah (PPnBM)	39
2.5 Pemeriksaan Pajak	39
2.6 Jurusita Pajak	42
2.6.1 Pengertian Jurusita	42
2.6.2 Tugas Jurusita Pajak	43

2.7 Penagihan Pajak	44
2.7.1 Pengertian Penagihan Pajak	44
2.7.2 Dasar Penagihan Pajak	45
2.7.2.1 Surat Ketetapan Pajak (SKP)	45
2.7.2.1.1 Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar	46
2.7.2.1.2 Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan	46
2.7.2.1.3 Surat Tagihan Pajak	47
2.7.3 Tindakan Penagihan Pajak	48
2.7.3.1 Pengeluaran Surat Teguran	48
2.7.3.2 Penerbitan Surat Paksa	48
2.7.3.3 Penyitaan	49
2.7.3.4 Lelang	49
2.7.4 Daluwarsa Penaihan Pajak	50
2.8 Penerbitan Surat Paksa	51
2.8.1 Pengertian Surat Paksa	51
2.8.2 Tujuan Penerbitan Surat Paksa	51
2.8.3 Kekuatan hukum Surat Paksa	52
2.8.4 Pelaksanaan Pemberitahuan Surat Paksa	53
2.8.5 Laporan Pelaksanaan Surat Paksa	54
2.9 Kerangka Pemikiran	55
 BAB III OBJEK DAN METODE PENELITIAN	 61
3.1 Objek Penelitian	61
3.2 Sejarah Singkat Kantor Pelayanan Pajak	61

3.2.1 KPP Pratama Bandung Bojonagara	66
3.2.2 KPP Pratama Bandung Cibeunying	70
3.2.2.1 Struktur Organisasi KPP Pratama Bandung Cibeunying	71
3.3 Metode Penelitian	72
3.3.1 Metode Yang Digunakan	72
3.3.2 Operasionalisasi Variabel	73
3.3.3 Penetapan Populasi Dan Sampel	74
3.3.4 Teknik Pengumpulan Data	74
3.3.5 Teknik Analisis Data dan Pengujian Hipotesis	75
3.3.5.1 Rancangan Pengujian Hipotesis	75
3.3.5.2 Penetapan Hipotesis	76
3.3.5.3 Tes Statistik untuk Pengujian Hipotesis	76
3.3.5.3.1 Analisis Uji Asumsi	77
3.3.5.3.2 Analisis Linear Sederhana	79
3.3.5.4 Pengujian Hipotesis	80
3.3.5.5 Penetapan Tingkat Signifikansi	81
3.3.5.6 Penarikan Kesimpulan	81
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	82
4.1 Hasil Penelitian	82
4.1.1 Proses Pelaksanaan Penagihan	82
4.1.1.1 Urutan Tindakan Penagihan Pajak	83
4.1.2 Data Hasil Penelitian	96

4.1.2.1 Penerbitan Surat Paksa	96
4.1.2.2 Penerimaan PPh dan PPN	98
4.2 Analisis Uji Asumsi Klasik	100
4.2.1 Uji Normalitas	100
4.2.2 Uji Heteroskedastisitas	101
4.3 Persamaan Regresi Linear Sederhana	102
4.4 Pengujian Hipotesis	103
4.5 Koefisien Determinasi	104
4.6 Pembahasan	105
 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	 107
5.1 Kesimpulan	107
5.2 Saran	108
 DAFTAR PUSTAKA	 109
RIWAYAT HIDUP	110

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Kerangka Pemikiran	60
Gambar 2	Kurva Daerah Penerimaan dan Penolakan H_0	105

DAFTAR TABEL

Tabel I	Kantor Pelayanan Pajak di Wilayah Kantor Wilayah DJP Jabar I	66
Tabel II	Operasionalisasi Variabel	74
Tabel III	Wajib Pajak yang Mendapat Surat Teguran pada KPP Bojonagara dan Cibeunying Tahun Anggaran 2008-2010	98
Tebel IV	Wajib Pajak yang Mendapat Surat Paksa pada KPP Bojonagara dan Cibeunying Tahun Anggaran 2008-2010	98
Tabel V	Persentase Wajib Pajak yang Mendapat Surat Paksa dan Surat Teguran Pada KPP Bojonagara Dan KPP Cibeunying Tahun Anggaran 2008-2010	99
Tabel VI	Target Penerimaan Dari Jumlah WP yang Belum Membayar Tunggalan Pajak Setelah Mendapat Surat Teguran pada KPP Bojonagara dan Cibeunying Tahun 2008-2010	100
Tabel VII	Realisasi Penerimaan Tunggalan Pajak Setelah Mendapat Surat Paksa pada KPP Bojonagara dan KPP Ciebunying Tahun 2008-2010	100
Tabel VIII	Persentase Target Penerimaan Dari Jumlah WP yang Belum Membayar Setelah Menerima Surat Teguran dan Realisasi Penerimaannya Setelah Mendapat Surat Paksa pada KPP Bojonagara dan Ciebunying Tahun 2008-2010	101
Tabel IX	Hasil Uji Normalitas dengan Kolmogorov Smirnov	101

Tabel X	Hasil Uji Heteroskedastisitas	102
Tabel XI	Hasil Uji Regresi Linier Sederhana	103
Tabel XII	Hasil Uji t	104
Tabel XIII	Hasil Koefisien Determinasi	106

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN A	Data Hasil Penelitian
LAMPIRAN B	Surat Hasil Penelitian